

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Sosial

Hersen Feiler Korengkeng

Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Universitas Hein Namotemo,
Tobelo, 97762, Indonesia

E-mail: hersenfeiler1968@gmail.com

Article Info

Article history:

Received March 17, 2026

Revised March 19, 2026

Accepted March 24, 2026

Keywords:

Tranparency;

Accountability;

Social Assistance Management;

ABSTRACT

Expenditures for social assistance are expenditures in the form of transfers of money, goods, or services provided by the government to the poor or unable to protect the community from possible social risks, increase economic capacity and/or community welfare. This study aims to analyze and empirically prove the effect of transparency and accountability on the management of social assistance in the People's Welfare and Labor Section of the Regional Secretariat of West Halmahera Regency. This type of research is quantitative research, using primary data through questionnaires. Respondents in this study were recipients of social assistance in West Halmahera Regency. The sample in this study were recipients of social assistance as many as 31 recipients of social assistance. The data were analyzed using multiple linear regression analysis and data testing was carried out with the help of the SPSS program version 24. The results of the study show that: 1) Transparency has a positive effect on the management of social assistance in the People's Welfare and Manpoweer Section of the Regional Secretariat of West Halmahera Regency. 2) Accountability has a positive effect on the management of social assistance in the People's Welfare and Labor Section of the Regional Secretariat of West Halmahera Regency. The value of the determinant coefficient is 0,679. This shows that the magnitude of the influence of the independent variable, namely transparency and accountability on the dependent variable, namely the management of social assistance explained by the equation model in this study is 67,90%. While the remaining 32,10% is explained by other factors outside this research model.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received March 17, 2026

Revised March 19, 2026

Accepted March 24, 2026

ABSTRACT

Belanja bantuan bosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan

Kata Kunci:

Transparansi;
Akuntabilitas;
Pengelolaan Bantuan Sosial;

ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah penerima bantuan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah penerima bantuan sosial sebanyak 31 penerima bantuan sosial. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian data dilakukan dengan dibantu oleh program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. 2) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Nilai koefisien determinan adalah 0,679. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan bantuan sosial yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 67,90%. Sedangkan sisanya sebesar 32,10% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Hersen Feiler Korengkeng
Universitas Hein Namotemo
E-mail: hersenfeiler1968@gmail.com

PENDAHULUAN

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja yang menyedot perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial ini, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya harus dilakukan secara akuntabel, agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah terkait. Sebagai pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial, pada tahun 2015 Pemerintah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam PMK tersebut mengamanatkan bahwa seluruh bantuan sosial harus

diberikan langsung atau ditransfer kepada penerima manfaat/masyarakat. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan dana bantuan sosial.

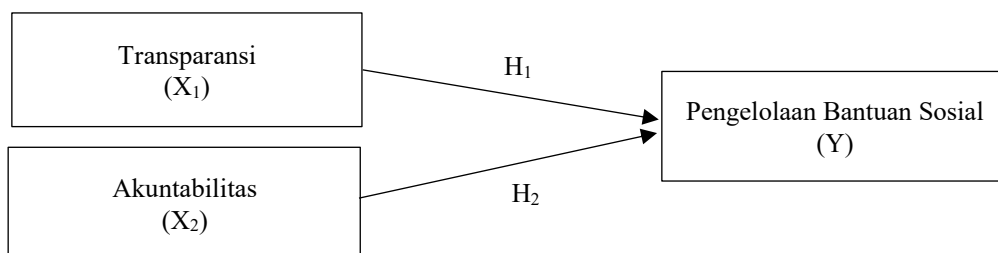
Sumarsono (2019) menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang mengarah pada transparansi akan meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Maka semakin baik transparansi, semakin baik pula pengelolaan APBD pada suatu daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektif dengan prinsip transparan, yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan teori keagenan pada sektor publik bahwa, fungsi pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) dalam hal ini masyarakat (Halim, 2018). Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektif dengan prinsip akuntabilitas, yang merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Adrianto, 2017:20). Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2019:30).

Menurut Folscher (2000) dalam Nurhatifa dkk (2021) mengungkapkan bahwa keuntungan dari adanya transparansi adalah dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, dan meningkatkan iklim investasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sriwijayanti (2018) yang menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya transparansi, maka pengelolaan APBD juga akan semakin baik. Artinya apabila dalam melaksanakan pengelolaan APBD pada seluruh organisasi perangkat daerah melakukan transparansi, maka pengelolaan APBD telah mengacu kepada pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip *value for money*. Sejalan dengan teori yang pernah dinyatakan oleh Sumarsono (2019) bahwa, pengelolaan APBD yang mengarah pada transparansi akan meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Maka semakin baik transparansi, semakin baik pula pengelolaan bantuan sosial pada suatu daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₁: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya (Lukito, 2018:2). Halim (2018:136) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat berkontribusi dan berperan dalam pengelolaan bantuan sosial untuk mewujudkan dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ishak dan Amalia (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan penyaluran dana hibah. Artinya apabila semakin akuntabelnya pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan dana hibah, maka pengelolaan APBD telah mengacu kepada pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip *value for money*. Sesuai dengan teori keagenan pada sektor publik bahwa, fungsi pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) dalam hal ini masyarakat (Halim, 2018).

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis kedua yaitu :

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menggunakan teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas yang mempengaruhi pengelolaan bantuan sosial. Penelitian ini dilakukan di bagian kesejahteraan rakyat dan tenaga kerja sekretariat daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Sugiyono (2017) populasi disebut juga *universum* yaitu generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini berjumlah 31 penerima bantuan sosial di Kabupaten Halmahera Barat.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiyono (2017) berpendapat bahwa makin besar jumlah sampel yang mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sumber data. Sampel berjumlah 31 penerima bantuan sosial di Kabupaten Halmahera Barat.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode survey dan studi kepustakaan. Metode survey yaitu dengan cara pengumpulan data primer dari para responden yang terpilih menjadi sampel penelitian. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengutip, dan memasuki berbagai informasi dan teori yang dibutuhkan untuk mengungkap masalah yang dijadikan obyek penelitian dan untuk menyusun konsep penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diadopsi dan dimodifikasi dari beberapa penelitian terdahulu. Untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Sugiyono (2017:122) menjelaskan bahwa instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan sosial diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda dalam Sunyoto (2018:47) memiliki persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Pengelolaan Bantuan Sosial
- α = Harga Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- X_1 = Transparansi
- X_2 = Akuntabilitas
- e = *Error*

Untuk operasional variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) sebagai variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan adalah Pengelolaan Bantuan Sosial (Y). Untuk mempermudah dalam melaksanakan dan menganalisis hasil penelitian, maka variabel-variabel tersebut dioperasionalisasikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Bantuan Sosial (Y)

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Permensos No. 1 Tahun 2019). Indikator pengelolaan bantuan sosial yang digunakan sebagai dasar instrumen pertanyaan dalam kuesioner, diadopsi dan dikembangkan dari penelitian Sriwijayanti (2018) yaitu terdiri atas perencanaan, program bantuan sosial, pertanggungjawaban dan pengawasan bantuan sosial.

2. Transparansi (X_1)

Transparansi adalah kewajiban pengelola dana bantuan sosial untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi pengelolaan bantuan social (Sukritsno, 2019). Indikator dalam variabel ini diadopsi dari Sriwijayanti (2018), yaitu: Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

3. Akuntabilitas (X_2)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan bantuan sosial (Mardiasmo, 2019). Indikator dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Asmoro dan Setianingsih (2019) yaitu : Keputusan harus dibuat secara tertulis, Akurasi dan kelengkapan informasi, Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, dan Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil pengisian kuesioner oleh para responden. Peneliti mengantarkan langsung kuesioner kepada responden untuk mengantisipasi terjadinya *respond rate* yang rendah pada saat pengembalian kuesioner.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok tertentu. Uji validitas dilakukan untuk setiap butir pertanyaan. Hasil r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} dimana $df=n-2$ dengan sig 5%. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ maka valid (Sujarweni, 2017:239). Dalam penelitian ini, r_{tabel} dengan menggunakan $df=29$ (diperoleh dari sampel 31 dikurangi 2) dan tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 0,301. Hasil uji validasi menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2) dan Pengelolaan Bantuan Sosial (Y) memiliki kriteria valid karena masing-masing item pertanyaan mempunyai nilai $r_{tabel} < r_{hitung}$.

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha $> 0,70$ maka reliabel (Sujarweni, 2017:239). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk transparansi sebesar 0,827, akuntabilitas sebesar 0,923 dan pengelolaan bantuan sosial sebesar 0,821. Dengan demikian seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih dari 0,70.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Jika probabilitas $> 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal, dan apabila probabilitas $< 0,05$ maka data penelitian dianggap tidak berdistribusi normal (Sujarweni, 2017:72). Hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa koefisien *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,104 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200. Nilai signifikansi ini lebih besar dari $\alpha 0,05$ ($0,200 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa data dalam variabel penelitian ini terdistribusi secara normal.



Uji multikolinieritas menurut Sujarweni (2017:230) diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Uji VIF (*Variances Inflation Factor*) yang dihasilkan antara 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas diketahui pada nilai *Tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,1 dan tidak ada variabel independen memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu nilai VIF untuk variabel transparansi (X_1) sebesar $2,115 < 10$ dan nilai *tolerance* $0,473 > 0,1$; nilai VIF untuk variabel akuntabilitas (X_2) sebesar $2,115 < 10$ dan nilai *tolerance* $0,473 > 0,1$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah persamaan regresi berganda terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glesjer. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi (Sujarweni, 2017:238). Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, yaitu transparansi sebesar 0,341 dan akuntabilitas sebesar 0,631. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) terhadap Pengelolaan Bantuan Sosial (Y). Hasil analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil analisis regresi berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
	B	Std. Error
(Constant)	0,599	0,421
Transparansi (X_1)	0,577	0,156
Akuntabilitas (X_2)	0,240	0,106

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (1)$$

$$Y = 0,599 + 0,577X_1 + 0,240X_2 + e \quad (2)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa arah garis tersebut linier dan merupakan hubungan yang positif. Atau dengan kata lain bahwa ada pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilakukan dengan membandingkan *p-value* pada kolom t dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% (Sujarweni, 2017:113). Hasil uji t pada output SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil uji hipotesis

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	0,599	0,421		
Transparansi (X ₁)	0,577	0,156	0,557	3,698	0,001
Akuntabilitas (X ₂)	0,240	0,106	0,340	2,258	0,032

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Nilai t_{hitung} dari transparansi (X₁) adalah 3,698 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,698 > 2,048). Signifikansi dari variabel transparansi (X₁) adalah sebesar 0,001 artinya $p-value < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} diterima dan H₀₁ ditolak, terbukti bahwa transparansi (X₁) berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial (Y). Nilai t_{hitung} dari akuntabilitas (X₂) adalah 2,258 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,258 > 2,048). Signifikansi dari variabel akuntabilitas (X₂) adalah 0,032 artinya $p-value < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a2} diterima dan H₀₂ ditolak, terbukti bahwa akuntabilitas (X₂) berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial (Y). Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien korelasi (R) berkisar antara 0 sampai 1, jika nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah (Sujarweni, 2017:80). Sedangkan nilai koefisien determinan (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen untuk berkontribusi terhadap variabel dependen. Uji koefisien korelasi dan koefisien determinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil koefisien determinan dan koefisien korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,837	0,700	0,679	0,26176

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Nilai koefisien determinasi atau *adjust R²* adalah sebesar 0,679 atau 67,90%. Angka tersebut berarti sebesar 67,90% Pengelolaan Bantuan Sosial (Y) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dapat dijelaskan oleh variabel Transparansi (X₁) dan Akuntabilitas (X₂). Sedangkan sisanya (100% - 67,90% = 32,10%) disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar pengujian ini. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,700 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen merupakan hubungan yang kuat. Artinya Transparansi (X₁) dan Akuntabilitas (X₂) terhadap Pengelolaan Bantuan Sosial mempunyai hubungan yang kuat.

3.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Sosial

Hasil uji hipotesis pertama (H₁) terkait pengaruh transparansi terhadap pengelolaan bantuan sosial menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Halmahera Barat. Dengan demikian hipotesis 1 terdukung karena secara empirik terbukti.

Interpretasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya transparansi maka pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat akan semakin baik. Pengelolaan bantuan sosial akan terwujud dengan baik apabila para pengelola wajib untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

Hasil pengujian ini selaras dengan konsep transparansi menurut Ratminto dan Winarsih (2019) yang menyatakan bahwa transparansi adalah prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Adrianto, 2017:20). Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2019:30). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sriwijayanti (2018) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Artinya, semakin meningkatnya transparansi, maka pengelolaan APBD juga akan semakin baik. Sejalan dengan teori yang pernah dinyatakan oleh Sumarsono (2019) bahwa, pengelolaan APBD yang mengarah pada transparansi akan meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Maka semakin baik transparansi, semakin baik pula pengelolaan bantuan sosial pada suatu daerah.

3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Sosial

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) terkait pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan sosial menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dengan demikian hipotesis 2 terdukung karena secara empirik terbukti.

Interpretasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini menunjukkan pula bahwa akuntabilitas dapat mempengaruhi pengelolaan bantuan sosial. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Hasil pengujian ini selaras dengan konsep akuntabilitas menurut Halim (2018:136) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dapat berkontribusi dan berperan dalam pengelolaan bantuan sosial untuk mewujudkan dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ishak dan Amalia (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan penyaluran dana hibah. Artinya apabila semakin akuntabelnya pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan dana hibah, maka pengelolaan APBD telah mengacu kepada pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip *value for money*. Sesuai dengan teori keagenan pada sektor publik bahwa, fungsi pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) dalam hal ini masyarakat (Halim, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Artinya, pengelolaan bantuan sosial akan terwujud dengan baik apabila para pengelola wajib untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Artinya, akuntabilitas dapat mempengaruhi pengelolaan bantuan sosial. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. (2017). *Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia.
- Asmoro, W. K., dan Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Prodama dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 270-277.
- Halim, Abdul. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ishak, K., dan Amalia, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 67-82.
- Lukito, Penny, Kusumastuti. (2018). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke depan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.



- Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurhatifa, N., Ramadhan, M. R., dan Rahmat, M. R. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Lagading Masa Pandemi Covid 19. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 173-177.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2019). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Sumarsono, Hadi, (2019). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.1 No.1.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 7(1), 88.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, D. (2018). Metodologi Penelitian Akuntansi. PT. Refika Aditama Bandung.
- Sukrisno, Agoes. (2019). Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid 1 Edisi 3. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.